



Konflik Dan Solusi Papua Merdeka Dalam Pemikiran Paul Feyerabend

Devy Eka Yanthi Sagita^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Koto Balingka, Indonesia

¹ dsdevhie617@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 April 2023;

Revised: 16 April 2023;

Accepted: 25 April 2023.

Kata-kata kunci:

Konflik;

Papua;

Pemikiran;

Pengembangan Metodologi.

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan yaitu: pertama, mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi konflik di tanah Papua dan bentuk dan dampak yang terjadi akibat konflik Papua. Kedua, mengidentifikasi upaya dan solusi pemerintah Indonesia untuk Papua dan menggambarkan suatu sudut pandang Paul Feyerabend pada konflik Papua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait dengan program dan penerapan merdeka belajar di sekolah. Hasil penelitian menemukan bahwa Gagasan yang ditulis Feyerabend mengenai Anarkisme Epistemologi tentunya tidak hanya didedikasikan bagi kepentingan dalam dunia sains atau ilmiah saja, tetapi juga dalam pergulatan sosial dan budaya agar lebih praktis, menurut Feyerabend gagasan tersebut tidak hanya penting dalam pengembangan metodologi saja, melainkan sebuah pandangan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Papua banyak sekali terjadi konflik hingga gerakan separatism. Pada saat itu kekerasan dipercayai sebagai instrument untuk mencapai titik kekuasaan. Kekerasan menjadi alat untuk mencapai sebuah rasa kepuasan.

Keywords:

Conflict;

Papua;

Thoughts;

Methodology Development.

ABSTRACT

***Conflict and Solutions of Free Papua in the Mind of Paul Feyerabend.** This article has a purpose: first, identify what causes conflict in the land of Papua and the forms and impacts that occur due to the Papua conflict. Second, identify the Indonesian government's efforts and solutions for Papua and illustrate a Paul Feyerabend point of view on the Papua conflict. Research uses qualitative methods with literature studies. Literature studies are intended to understand the diverse literature associated with programs and the application of independent learning in schools. The results of the study found that feyerabend's ideas on epistemological anarchism are certainly not only dedicated to interests in science or science, but also in social and cultural struggles to be more practical. According to Feyerabend, the idea is not only important in the development of methodology, but a view of humanity. As we know that in social life in Papuan society there are many conflicts to separatist movements. At that time violence was believed to be an instrument to reach the point of power. Violence becomes a means of achieving a sense of satisfaction.*

Copyright © 2023 (Devy Eka Yanthi Sagita). All Right Reserved

How to Cite : Sagita, D. E. Y. (2023). Konflik Dan Solusi Papua Merdeka Dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 47–52. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.440>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Papua terletak di wilayah Indonesia bagian timur. Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Belanda sudah merencanakan untuk membentuk pemerintahan baru bagi Papua yang nantinya akan memisahkan diri dari Belanda maupun Indonesia, termasuk badan legislative, bendera, hingga lagu kebangsaan sendiri. Ketidakpuasan masyarakat Papua yang menjadikannya ingin memerdekakan diri, karena secara fakta mereka masih miskin dan *marginal*. Kondisi kemiskinan mereka dapat dilihat dari tempat tinggal yang tidak memiliki sarana transportasi yang memadai ke pusat pelayanan ekonomi, dan sosial.

Menurut pandangan mereka, pemerintah pusat dinilai gagal dalam upaya membangun kesejahteraan bagi masyarakat Papua, Pemerintah Indonesia membentuk Pasukan Militer untuk berupaya dalam mengatasi pemberontakan separatism yang terjadi di Papua, namun faktanya justru banyak sekali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal itulah yang semakin memperkuat keinginan masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Indonesia. Selain dari aspek ekonomi di Papua, pemberontakan separatism dipicu oleh konflik yang berjalur dari kekewaan historis, nasionalisme Papua, peminggiran sosial dan budaya, dan diskriminasi terkait politik maupun hukum. Separatism yang terjadi di Papua didukung oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kemudian disusul pembentukan Presidium Dewan Papua. Gerakan tersebut sudah ada sejak tahun 1965 melalui aktivitas dalam sewaktu-waktu dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka ditandai dengan adanya penyanderaan, pengibaran bendera, demonstrasi massa, penempelan pamphlet, aksi-aksi pengrusakan, dan pelanggaran lintas batas negara (Sianturi, & Hanita, 2020; Aulia, 2018).

Paul Karl Feyerabend merupakan seorang filsuf sains yang lahir di Wina, Austria pada tahun 1924, ia memberikan gagasan penting yaitu “Anarkisme Epistemologi”. Mengenai suatu pandangan-pandangannya dapat ditempatkan pada situasi arus perubahan mendasar dalam paradigma ilmu pengetahuan di abad ke-20 dengan khas gaya penyampaiannya yang sangat provokatif bahkan sangat ekstrim. Feyerabend dikenal sebagai salah seorang tokoh utama yang melakukan perlawanan terhadap kemapanan positivis yang telah menjadi hegemoni dalam perkembangan dalam ilmu pengetahuan, ia berusaha mendobrak ilmu pengetahuan secara terancang dan telah mengalami keberhasilan yang begitu tertutup terhadap realitas di luar dirinya, Feyerabend pun berada dalam *setting* sosial dan politik pada abad ke dua puluh.

Berbagai konflik yang kian terjadi di Papua tentunya membuat masyarakat Papua semakin menderita. Mulai dari adanya Gerakan Separatisme hingga Organisasi Papua Merdeka yang berambisi ingin berpisah dengan Negara Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah yang diharapkan dapat menggambarkan secara rinci mengenai konflik Papua dengan sudut pandang Paul Feyerabend: 1. Mengapa konflik di tanah Papua dapat terjadi? 2. Bagaimana upaya dan solusi pemerintah Indonesia untuk Papua agar memperkecil terjadinya sebuah konflik?

Artikel ini memiliki tujuan yaitu: 1. Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi konflik di tanah Papua. 2. Mengidentifikasi bentuk dan dampak yang terjadi akibat konflik Papua. 3. Mengidentifikasi upaya dan solusi pemerintah Indonesia untuk Papua. 4. Menggambarkan suatu sudut pandang Paul Feyerabend pada konflik Papua.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait dengan program dan penerapan merdeka belajar di sekolah. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Rukajat, 2018). Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber

kepastakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Analisis penelitian ini melakukan pembacaan pada teks, lalu memberi tafsiran pada obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan penting yang ditulis oleh Feyerabend mengenai anarkisme epistemologi dengan salah satu prinsip yang sama pentingnya yaitu Anything Goes bersama-sama dengan prinsip proliferasi tentunya tidak hanya didedikasikan oleh Feyerabend bagi kepentingan dalam dunia sains atau ilmiah saja, tetapi juga dalam pergulatan sosial dan budaya agar lebih praktis, karena menurut Feyerabend gagasan “Anarkisme Epistemologi” tidak hanya penting dalam pengembangan metodologi saja, melainkan sebuah pandangan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Papua banyak sekali terjadi konflik hingga gerakan separatisme. Tak lain berbagai macam konflik itu terjadi tentunya dipicu oleh sebuah permasalahan contohnya seperti gerakan separatisme yang terjadi karena kekecewaan rakyat Papua kepada Pemerintah Indonesia yaitu karena Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas Irian Jaya/Papua Barat dan tidak mau melepaskan kepada pihak manapun (Belanda) maupun kepada rakyat Papua sebagai negara yang merdeka.

Banyak sekali kajian dan penelitian yang meninjau secara mendalam terkait sumber konflik yang terjadi di tanah Papua. Seorang ahli sejarah politik Papua, Richard Chauvel menyimpulkan bahwa sedikitnya terdapat empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yaitu; (a) Rasa kekecewaan masyarakat Papua karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Terdapat persaingan sengit yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang memimpin pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di Papua yang berbeda dan jauh tertinggal dengan daerah-daerah lainnya, dan (d) Pembatasan oleh orang asli Papua karena kekhawatiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut tentunya menjadi validitas bagi kelompok yang merasakan ketidakpuasan sehingga melahirkan kelompok pro-kemerdekaan di tanah Papua.

Empat persoalan yang diutarakan oleh Richard Chauvel tersebut tentunya dapat kita perluas menjadi lima persoalan basis, yaitu; (1) Faktor kebijakan dan kegagalan pembangunan. Seperti yang kita ketahui secara umum, konflik dapat terjadi karena adanya kegagalan pembangunan serta adanya tuntutan pembagian kewenangan politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi, (2) Faktor identitas agama, budaya, ras, dan rasial. Konflik yang terjadi antara agama, suku, budaya, dan etnis sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat, (3) Faktor sejarah. Banyaknya perbedaan sejarah terbentuknya Negara Indonesia dengan daerah tertentu, (4) Faktor kekerasan aparat keamanan yang dilakukan oleh pasukan militer atau polisi terhadap masyarakat Papua, dan (5) Faktor kepentingan perusahaan dan kapitalisme internasional. Perseteruan yang terjadi antara masyarakat terhadap kepentingan kapitalisme internasional dalam bentuk integritas yang beroperasi di wilayah Papua.

Papua memiliki sumber daya alam yang berlimpah, jika kita lihat kekayaan alam Papua, tentunya merupakan suatu anugerah yang sangat ternilai harganya yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selama ini kita hanya melihat bahwa kekayaan alam yang dimiliki Papua nyatanya tidak menjadikan masyarakat Papua menikmati kemakmuran yang sebanding dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Pemerintah tentunya harus mempersiapkan program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang tentunya lebih berkesinambungan terkait dengan pembangunan sarana pendidikan, sosial, ekonomi di tanah Papua.

Paul Feyerabend memang berada dalam setting sosial dan politik pada abad kedua puluh, didalam situasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, dalam hal tersebut munculah kekerasan, eksploitasi besar-besaran, dan tak sedikit pula muncul konflik antar manusia, hal tersebut tidak jauh berbeda seperti kondisi di tanah Papua. Pada saat itu kekerasan dipercayai sebagai instrument untuk mencapai titik kekuasaan. Kekerasan menjadi alat untuk mencapai sebuah rasa kepuasan,

timbulnya kekerasan tak lain disebabkan oleh sistem politik yang tidak dapat mengontrol potensi pemusnah yang ditimbulkan oleh teknologi, sementara itu teknologi sering sekali dimanfaatkan dalam konflik-konflik bersenjata. (Pitaloka, 2004; 66).

Pencabutan status Daerah Operasi Militer di Papua oleh Presiden B.J. Habibie merupakan bentuk kesungguhan rezim informasi untuk memenuhi reformasi total di segala aspek kenegaraan, termasuk untuk mengobati goresan luka sejarah di Papua, tentunya sejak tahun 1962 hingga 1984 menjadi sebuah tahapan kelam bagi Papua, dimana pada saat itu pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer untuk menumpas Operasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok separatism yang begitu menginginkan Papua memisahkan diri dari Indonesia. Konflik yang terjadi antara OPM dengan

Pemerintah Indonesia merupakan sebuah konflik dengan akar permasalahan yang kompleks. Dalam pemikiran Feyerabend bahwa pendapat atau hipotesa apapun boleh dipakai, bahkan sekalipun yang tidak dapat diterima secara rasional, ataupun pendapat tersebut berbeda dengan yang terjadi sebenarnya. OPM sendiri selama ini memandang dan berfikir bahwa Pemerintah Indonesia menjajah Papua dan menuruti cara yang tidak benar-benar mewakili bagi masyarakat Papua pada saat penentuan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga dalam mengesampingkan tujuan utama Indonesia yang selama ini dipandang oleh masyarakat Papua, dari pandangan tersebut seharusnya Indonesia dapat membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia yang merangkul dan membangun wilayah Papua, bukan yang menjajah. Keadaan yang rumit tersebut menuntut Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan Organisasi Papua Merdeka (OPM) paling tidak sebanding dengan apa yang di dapat oleh OPM bila melepaskan diri dari Indonesia. OPM memandang Indonesia menjajah Papua awalnya karena dilatarbelakangi oleh perbedaan dan juga kesenjangan sosial antara Papua dengan daerah lain di Indonesia baik itu dalam segi budaya, wilayah, ekonomi, maupun etnis.

Konflik yang terjadi di tanah Papua merupakan masalah yang bersifat pancamuka, jika digali lebih dalam secara teliti banyak sekali ditemukan anasir terkait politik, ekonomi, pertanahan, keamanan, sosial, hingga budaya. Maka solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan Papua tentunya harus dirumuskan secara integral, holistic, dan komprehensif. Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 menumbangkan kekuasaan Soeharto menjadi momentum transformasi cara pandang dalam menangani isu serta konflik Papua, yang semula sifatnya otoritarian berubah menjadi pendekatan secara humanis.

Reformasi merupakan pelaksanaan dari sebuah demokrasi karena berlandaskan pada keinginan dan kekuasaan rakyat, tentunya hal tersebut menjadikan landasan bagi terwujudnya hubungan sosial masyarakat Papua yang semakin baik. Pemikiran Feyerabend menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kehidupan sosial dan pemikiran politik yang paradigmatic, hal tersebut telah menampilkan pluralism politik (Rahman, 2010). Dengan ide demokrasi sosial, Feyerabend mengambil manfaat dari adanya masyarakat yang terbuka (open society) dalam mengutarakan pendapat bahkan dapat lebih dari itu seperti yang disebutkan oleh Karl Popper (2012).

Menurut Feyerabend ilmu pengetahuan tidak ubahnya lagi seperti sandingan ajaran dogmatis yang tidak boleh dipertanyakan ataupun ditentang. Maka tidak heran jika gagasan yang digunakan oleh Feyerabend adalah Anarkisme Epistemologis, dalam gagasan tersebut ditegaskan bahwa ilmu adalah urusan pribadi, sifatnya individual, dan berarti mendorong seseorang pada kemandirian dalam memahami dan menemukan ilmu. Ilmu pengetahuan tentang penghayatan terhadap nilai-nilai dalam Pancasila tentunya perlu dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena seperti yang dikemukakan oleh Muzayin (1992: 16) bahwa “Dengan Pancasila, perpecahan Bangsa Indonesia tentunya akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang terjadi dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh”.

Berdasarkan pernyataan Muzayin, maka dapat kita pahami bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling tepat dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan sosial dalam

masyarakat, berbangsa, maupun bernegara maka tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menghimpun segala keberagaman yang terjadi dalam masyarakat sehingga menjadikan sebuah keberagaman itu bukan sebagai penghalang untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi dalam hal ini mengandung beberapa pengertian, secara literal ideologi seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan tentang sebuah ide-ide ataupun gagasan yang tepat, ideologi seringkali diartikan sebagai pemikiran dogmatis yang tidak benar atau bahkan palsu, sehingga hal tersebut menutupi kenyataan yang sebenarnya (Pitaloka, 2004: 98).

Untuk dapat menyelesaikan konflik internal yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatism Papua tentunya perlu dicari titik tengah isu apa yang dapat di trading, yakni suatu isu yang sebanding bagi kedua belah pihak untuk sampai kata sepakat. Agar dialog yang terjadi antara dua arah tersebut dapat berjalan secara efektif, Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik tersebut dengan tidak melibatkan campur tangan pihak asing, sehingga penyelesaian konflik yang terjadi murni hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Papua. Karena terdapat banyak sekali isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Papua yang memberikan tindakan munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat Papua, contohnya adalah masalah pembangunan infrastruktur, rasisme, optimalisasi pelayanan public, intensitas, pelanggaran HAM, nilai-nilai budaya, dan sebagainya yang hal-hal tersebut masih masuk ke dalam lintasan wacana kebangsaan dan bukan wacana separatisme (Hikam, 2018).

Dari penyelesaian konflik yang sudah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia ditunjukkan bahwa kepentingan utama Indonesia adalah untuk mempertahankan wilayah Papua sebagai bagian dari Negara Indonesia, mengakhiri serangan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan tidak sedikitpun memberikan celah OPM untuk melakukan referendum. Pihak Pemerintah Indonesia merupakan pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi daripada OPM, disisi lain atas dasar budaya dan juga sejarah mereka tidak mengakui wilayah Papua sebagai bagian dari Negara Indonesia, maka dari itu OPM menuntut referendum terhadap Pemerintah Indonesia dan bagaimanapun juga tetap melakukan upaya separatisme (Febrianti, & Arum, 2019; Faturahman, 2017).

Melalui mekanisme horse-trading ini tentunya adalah cara penyelesaian yang paling efektif untuk ditempuh karena dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak, tentunya Pemerintah Indonesia harus cermat dalam Menyusun strategi dialog dengan cara memperhatikan aspek-aspek pola, arah pembicaraan, dan efektivitas dalam penyelesaian konflik politik. Di dalam *Against Method*, Feyerabend menyampaikan pandangannya bahwa suatu permasalahan yang terjadi antara dua belah pihak, tentunya kedua belah pihak tersebut turut berpartisipasi di dalam setiap keputusan-keputusannya. Cara kita untuk menerima atau menolak ide-ide dan prosedur dalam sebuah keputusan pasti selalu ada dalam sebuah musyawarah demokratis. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa beberapa orang percaya bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari di saat yang lain menganggap bumi seperti ruang melengkung yang menyimpan matahari, planet-planet, dan bintang yang menetap di dalamnya. Artinya jika terdapat sebuah konflik dan perbedaan pendapat maka dalam menentukan sebuah keputusan terutama antara dua belah pihak, keduanya perlu berpartisipasi dalam menentukan keputusan tersebut sehingga dapat ditemukan jawaban dan suatu solusi yang terbaik (Tosepu, 2018).

Simpulan

Gagasan yang ditulis Feyerabend mengenai Anarkisme Epistemologi tentunya tidak hanya didedikasikan bagi kepentingan dalam dunia sains atau ilmiah saja, tetapi juga dalam pergulatan sosial dan budaya agar lebih praktis, menurut Feyerabend gagasan tersebut tidak hanya penting dalam pengembangan metodologi saja, melainkan sebuah pandangan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Papua banyak sekali terjadi konflik hingga gerakan separatism. Pada saat itu kekerasan dipercayai sebagai instrument untuk mencapai titik kekuasaan. Kekerasan menjadi alat untuk mencapai sebuah rasa kepuasan, timbulnya kekerasan tak lain

disebabkan oleh sistem politik yang tidak dapat mengontrol potensi pemusnah yang ditimbulkan oleh teknologi, sementara itu teknologi sering sekali dimanfaatkan dalam konflik-konflik bersenjata. Dengan ide demokrasi sosial, Feyerabend mengambil manfaat dari adanya masyarakat yang terbuka dalam mengutarakan pendapat bahkan dapat lebih dari itu. Ilmu pengetahuan tidak ubahnya lagi seperti sandingan ajaran dogmatis yang tidak boleh dipertanyakan maupun ditentang. Maka tidak heran jika gagasan yang digunakan oleh Feyerabend ditegaskan bahwa ilmu merupakan urusan pribadi, sifatnya individual, dan berarti mendorong seseorang pada kemandirian dalam memahami dan menemukan ilmu. Ilmu pengetahuan tentang penghayatan terhadap nilai-nilai dalam Pancasila tentunya perlu dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan Pancasila, maka perpecahan Bangsa Indonesia tentunya akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Saran penelitian adalah bahwa pemerintah Indonesia membuka ruang dialog terkait pembahasan mengenai penyelesaian isu HAM, tentunya dalam penyelenggaraan tersebut harus melibatkan semua pihak.

Referensi

- Anugerah, Boy. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Edisi 40.
- Aulia, N. (2018). Konstruksi Realitas Sosial Di Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Konflik Antara Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dengan Aparat Keamanan Republik Indonesia (Ri) Di Kompas. Com Edisi Oktober-November 2017) (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*.
- Faturahman, F. (2017). Self-determination Right Papua Pasca Otonomi Khusus dalam Perspektif Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Febrianti, S. W., & Arum, A. S. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading.
- Ferry, Luc. (2019). *A brief history of thought: A Philosophical guide to living*. Canongate Books.
- Feyerabend, P.K. (1982). *Against Method*
- Hikam, M. A. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1-17.
- Kuspanita. (2019). "Kerusuhan Yang Terjadi Di Papua Ditinjau Dari Tujuan Negara Dan Tujuan Legitimasi Negara Pancasila.
- Nomensen ST. Mambraku. (2015). Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik.
- Pitaloka. (2004). *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Galang Press.
- Popper, Karl. (2012). *The open society and its enemies*.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta Deepublish.
- Sekar Wulan Febrianti, dkk. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme *Horse-Trading*.
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 73-94.
- Tosepu, Y. A. (2018). Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik di Dunia Virtual). Surabaya. CV Jakad.
- Widarda, Dodo. (2019). Demokrasi Sosial dalam Pemikiran Paul Feyerabend.